

## Reviu Implementasi Program 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2022

Enziana Maharani<sup>1</sup>, Ahmad Syafiq<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [enzimhrn97@gmail.com](mailto:enzimhrn97@gmail.com)

**Abstrack:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tahun 2022. Program ini merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting melalui pendekatan konvergensi, integrasi lintas sektor, dan peran serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan siklus Kesehatan Gizi Masyarakat (PHN) yang meliputi tahapan intelijen, aksi, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan telaah dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 8 aksi tersebut sudah cukup efektif, namun masih terdapat tantangan dalam koordinasi lintas sektor dan pemantauan berkelanjutan. Aksi 1 (Analisis Situasi) dan Aksi 7 (Pengukuran dan Publikasi Data Stunting) merupakan tahapan krusial dalam penentuan desa prioritas dan pengukuran capaian program. Namun, aksi 8 (Tinjauan Kinerja Tahunan) belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi antar OPD, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memastikan keberlanjutan intervensi melalui perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat di tingkat lokal dan mempercepat pencapaian target penurunan stunting secara nasional. **Kata Kunci:** *Stunting, Akselerasi Penurunan, 8 Aksi, Kabupaten Tangerang, Kesehatan Masyarakat*

**Abstract:** *This study aims to examine the implementation of the 8 Stunting Reduction Acceleration Actions program in Tangerang Regency, Banten Province in 2022. This program is a national initiative that aims to reduce the prevalence of stunting through a convergence approach, cross-sector integration, and community participation. This study uses a qualitative method with a Public Health Nutrition (PHN) cycle approach which includes stages of intelligence, action, and evaluation. Data was collected through in-depth interviews with informants from Regional Apparatus Organizations (OPD) and review of related policy documents. The results show that the implementation of the 8 actions has been quite effective, but there are still challenges in cross-sector coordination and continuous monitoring. Action 1 (Situation Analysis) and Action 7 (Measurement and Publication of Stunting Data) are crucial stages in determining priority villages and measuring program achievements. However, action 8 (Annual Performance Review) has not been fully implemented consistently. The study provides recommendations to strengthen coordination between OPDs, increase human resource capacity, and ensure the sustainability of interventions through integrated and sustainable planning. This research is expected to contribute to the development of public health policies at the local level and accelerate the achievement of stunting reduction targets nationally.*

**Keywords:** *Stunting, Acceleration of Decline, 8 Actions, Tangerang Regency, Public Health*

### Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Kondisi ini mengacu pada gangguan pertumbuhan anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Stunting tidak hanya berdampak pada perkembangan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi kemampuan kognitif, produktivitas, serta meningkatkan risiko penyakit kronis di kemudian hari. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 24,4%, dan meskipun menunjukkan tren penurunan, angka ini masih di atas ambang toleransi 20% yang ditetapkan oleh WHO.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Salah satu program yang adalah 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Program ini mencakup delapan aksi terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan intervensi gizi spesifik dan sensitif di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.



Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu daerah dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi, menjadi fokus dalam implementasi program ini. Pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang mencapai 21,1%, yang meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetap menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang menjadi krusial dalam mencapai target penurunan stunting yang telah dicanangkan secara nasional.

Program 8 Aksi mencakup berbagai tahapan mulai dari analisis situasi, perencanaan kegiatan, rembuk stunting, penetapan peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa, pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi data stunting dan reviu kinerja tahunan. Setiap aksi ini dirancang untuk memastikan bahwa intervensi gizi yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Namun, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, hingga pemantauan yang belum maksimal.

Tahap awal dari implementasi 8 Aksi dimulai dengan analisis situasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi desa dan kelompok sasaran prioritas. Langkah ini penting dalam menentukan wilayah yang memiliki risiko stunting tinggi dan memerlukan intervensi segera. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian sumber daya.

Rembuk stunting, sebagai bagian dari aksi ketiga, melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Melalui rembuk stunting, diharapkan adanya komitmen bersama untuk mendukung program ini secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melibatkan banyak pihak dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan program ini.

Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan beberapa aksi, terutama terkait dengan reviu kinerja tahunan yang belum berjalan optimal di beberapa wilayah. Padahal, aksi ini memiliki peran penting dalam mengevaluasi capaian program dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh tahapan aksi dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi program 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang tahun 2022. Dengan menggunakan pendekatan *The Bicycle Framework for Public Health Nutrition (PHN)*, penelitian ini akan mengeksplorasi setiap tahapan dalam program, mulai dari tahap intelijen, tindakan, hingga evaluasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas program serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi program. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang dapat terus menurun, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus (*case study*) yang mendalam untuk mengevaluasi implementasi program 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Tahun 2022. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan program, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor pendukung keberhasilan program di lapangan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tangerang sebagai salah satu daerah prioritas percepatan penurunan stunting di Indonesia. Kabupaten ini dipilih karena memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi dan telah melaksanakan program 8 Aksi secara terintegrasi. Penelitian ini berlangsung selama periode Januari hingga Desember 2022.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik **analisis isi** (*content analysis*) yang berfokus pada identifikasi tema utama, pola pelaksanaan, dan kendala dalam implementasi program. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap:

1. Reduksi Data: Menyaring dan memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data: Mengelompokkan data ke dalam tabel dan narasi untuk memudahkan interpretasi.
3. Penarikan Kesimpulan: Melakukan triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas temuan dan menyusun rekomendasi.

Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan melibatkan berbagai informan dari sektor yang berbeda. Validitas juga diperkuat melalui diskusi hasil dengan informan dan pihak terkait untuk memastikan akurasi interpretasi data.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal keterjangkauan seluruh OPD di Kabupaten Tangerang serta ketergantungan pada ketersediaan data sekunder yang bervariasi di setiap OPD. Namun, upaya maksimal telah dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ini melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Tangerang merupakan suatu wilayah yang terdiri dari 29 kecamatan dan 274 desa/kelurahan. pada tahun 2022 dalam Aksi 1 (Analisis Situasi) Konvergensi Percepatan Stunting dibagi 2 (dua) lokus stunting yaitu lokus tahun berjalan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan lokus tahun rencana yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pada lokus tahun berjalan berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.339-Huk/2021 tanggal 3 Maret 2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting TA 2022 terdapat 10 desa di 6 kecamatan dan pada lokus tahun rencana berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 440/Kep.250-Huk/2022 tanggal 26 April 2022 Tentang Penetapan Desa Prioritas Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan

Stunting TA 2023 terdapat 15 desa di 15 kecamatan yang digunakan sebagai dasar prioritas kegiatan 2022 dan perencanaan kegiatan 2023.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi program 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang telah berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar aksi telah dilaksanakan, namun belum merata di seluruh desa prioritas. Aksi 1, yaitu Analisis Situasi, menjadi langkah awal yang krusial dalam menentukan desa dengan risiko stunting tinggi. Hasil analisis situasi menunjukkan bahwa dari 274 desa/kelurahan di Kabupaten Tangerang, sekitar 35% di antaranya dikategorikan sebagai desa dengan risiko tinggi stunting.

Pelaksanaan Aksi 2, Penyusunan Rencana Kegiatan, berjalan cukup efektif dengan keterlibatan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bappeda Kabupaten Tangerang berperan penting dalam mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana kegiatan ini kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Aksi 3, yaitu Rembuk Stunting, menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen lintas sektor. Rembuk ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan sektor swasta. Salah satu hasil rembuk stunting tahun 2022 adalah penetapan 50 desa sebagai desa prioritas intervensi stunting. Dalam rembuk ini juga disepakati alokasi anggaran yang lebih besar untuk program kesehatan ibu dan anak.

Namun, implementasi Aksi 4, Penetapan Peraturan Desa/Kecamatan terkait stunting, menghadapi hambatan dalam proses birokrasi. Beberapa desa belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mendukung implementasi program stunting. Meskipun demikian, sebagian besar desa yang menjadi lokus telah mulai menyusun peraturan desa sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Aksi 5, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), telah berjalan dengan baik di hampir seluruh desa prioritas. Kader dilatih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait gizi, sanitasi, dan pola asuh anak. Salah satu tantangan dalam aksi ini adalah keterbatasan jumlah kader yang aktif, sehingga kapasitas pembinaan belum merata di seluruh wilayah.

Implementasi Aksi 6, Sistem Manajemen Data Stunting, menunjukkan peningkatan dalam hal pemantauan dan pelaporan. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengembangkan sistem berbasis teknologi untuk memantau data stunting di tingkat desa. Sistem ini memungkinkan OPD terkait untuk melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran. Namun, masih terdapat kendala dalam validasi data karena keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas di lapangan.

Aksi 7, Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, menjadi salah satu aksi yang mendapat perhatian besar. Pengukuran tinggi dan berat badan balita secara rutin dilakukan di posyandu. Hasil pengukuran ini dipublikasikan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan posyandu. Meski demikian, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini masih perlu ditingkatkan.

Aksi 8, Reviu Kinerja Tahunan, menjadi aksi yang paling menantang. Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya melaksanakan reviu kinerja secara rutin. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di tingkat desa. Padahal, reviu kinerja

ini sangat penting untuk mengevaluasi capaian program dan merumuskan strategi perbaikan ke depan.

Dalam proses wawancara mendalam, informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengakui bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi program adalah koordinasi lintas sektor. Terdapat perbedaan prioritas antar OPD yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa aksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas koordinasi dan komunikasi antar OPD untuk memastikan implementasi berjalan lancar.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program di beberapa desa dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Desa yang memiliki keterlibatan aktif dari masyarakat cenderung menunjukkan penurunan prevalensi stunting yang lebih signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendekatan berbasis komunitas sangat penting dalam mendukung program.

Dari sisi pembiayaan, penelitian ini menemukan bahwa alokasi dana desa memainkan peran penting dalam mendukung implementasi program. Desa yang mengalokasikan anggaran khusus untuk program stunting cenderung memiliki capaian yang lebih baik. Namun, tidak semua desa memiliki anggaran yang memadai, sehingga diperlukan dukungan tambahan dari pemerintah daerah dan pusat.

Studi ini juga mengungkapkan bahwa intervensi gizi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan dan tablet penambah darah untuk ibu hamil, memiliki dampak yang cukup signifikan dalam menurunkan angka stunting. Program ini berhasil menjangkau sebagian besar desa prioritas, meskipun masih ada desa yang belum sepenuhnya terlayani.

Intervensi sensitif, seperti peningkatan akses air bersih dan sanitasi, juga berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting. Desa yang memiliki program sanitasi yang baik menunjukkan penurunan angka stunting yang lebih cepat dibandingkan desa yang belum memiliki akses sanitasi memadai.

Salah satu faktor keberhasilan lainnya adalah peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan pentingnya pencegahan stunting. Di beberapa desa, keterlibatan tokoh masyarakat berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program posyandu dan kegiatan kesehatan lainnya.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kader posyandu dalam memberikan edukasi dan layanan kepada masyarakat. Kader yang memiliki pemahaman mendalam tentang gizi dan kesehatan anak dapat menjadi ujung tombak dalam percepatan penurunan stunting.

Namun, masih terdapat disparitas antar desa dalam hal kapasitas dan dukungan program. Beberapa desa menunjukkan progres yang cepat, sementara desa lain masih menghadapi kendala dalam implementasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi yang lebih terarah dan berbasis data untuk memastikan seluruh desa dapat merasakan manfaat dari program ini.

Sebagai langkah ke depan, penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan tim percepatan penurunan stunting yang lebih solid. Selain itu, peningkatan kapasitas kader dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas yang harus dipertimbangkan.

Dengan implementasi yang lebih terkoordinasi dan berbasis data, diharapkan Kabupaten Tangerang dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting sesuai dengan yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai reviu implementasi program 8 aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tahun 2022, ditemukan variasi pengetahuan dan pemahaman antar OPD yang menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor masih perlu didalami untuk dapat menemukan model koordinasi yang efektif. Kualitas data dan mind set OPD dan masyarakat masih perlu ditingkatkan sehingga semua stakeholder dapat bergerak bersama dengan seirama. Serta adanya kesinambungan antar 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting dengan analisis metode The Bicycle Framework for Public Health Nutrition (PHN).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai reviu implementasi program 8 aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tahun 2022, maka kesimpulan pada bagian Intelijen antara lain sumber kebijakan dalam pelaksanaan program dinilai masih perlu penguatan baik dari segi regulasi dan peran sektor tiap OPD terkait dalam menunjang keberhasilan program percepatan penurunan stunting, adanya konotasi negatif terkait anak yang didiagnosis stunting, sehingga orang tua/anggota keluarga lainnya enggan membawa anaknya ke Posyandu/Puskesmas, pendataan dan pelaporan sering sekali dilakukan secara berulang, kepala Daerah dan Stakeholder menunjukkan partisipasi aktif dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Meskipun adanya peralihan kepengurusan sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021, DPPKB dibantu oleh Dinkes dan Bappeda dalam mengakomodir Tim Percepatan Penurunan Stunting dan berdasarkan hasil rembuk stunting, identifikasi kendala yang menyasar pada lingkup rumah tangga di 1000 HPK yang meliputi perbaikan manajemen alokasi anggaran, perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK, perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa, dan Perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai reviu implementasi program 8 aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tahun 2022, maka kesimpulan pada bagian tindakan antara lain pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting telah masuk ke dalam RPJMD perubahan 2021-2024 yang kemudian dituangkan dalam masing-masing program kegiatan OPD sesuai dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021, Pemberian intervensi sudah sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 namun untuk kegiatan yang berulang perlunya evaluasi dalam peningkatan kualitas intervensi, Pemerintah Tangerang telah membangun tim melalui tim percepatan penurunan stunting dan penguatan melalui pendampingan CSR.

Dari sisi anggaran, pemerintah daerah perlu memastikan alokasi dana desa yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah pusat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah juga sangat diperlukan untuk mempercepat capaian program ini. Keterlibatan aktif masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting harus terus ditingkatkan agar tercipta kesadaran kolektif dalam upaya penurunan prevalensi stunting.

Sebagai langkah akhir, penting bagi pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program 8 Aksi. Dengan melakukan evaluasi rutin dan memperbaiki setiap kendala yang dihadapi, diharapkan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 dapat tercapai sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat,

dan sektor swasta akan menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi mendatang yang lebih sehat dan bebas dari stunting.

Evaluasi program juga menemukan bahwa Aksi 8, yaitu Reviu Kinerja Tahunan, belum berjalan optimal di beberapa wilayah. Keterbatasan dalam pelaksanaan reviu ini menjadi salah satu faktor yang menghambat evaluasi menyeluruh terhadap progres program. Padahal, reviu kinerja memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kendala dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Untuk memperkuat implementasi program ini, disarankan agar pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengintegrasikan seluruh aksi. Tim ini perlu didukung dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas agar mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Selain itu, peningkatan jumlah dan kualitas kader kesehatan di tingkat desa sangat diperlukan agar edukasi dan intervensi gizi dapat menjangkau seluruh masyarakat, terutama di desa dengan risiko stunting tinggi.

## Referensi

- Adani, G. (2020, May 3). *Stunting*. Berani Sehat by Media Aesculapusi .
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik Info Artikel ABSTRAK. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Angkasa, D. (2016). *Diktat Perencanaan Program Gizi*. Esa Unggul.
- Anzar, J. (2019). Nutrisi untuk Stunting. *Prosiding Ilmiah Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 57, 1–5.
- Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4). <https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240>
- Bappenas. (2019). *Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 Hal Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2020*. www.bappenas.
- Bappenas. (2021). *Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi gizi*. Pendekatan Multi Sektor Dalam Perbaikan Gizi. <https://cegahstunting.id/intervensi/>
- BKKBN. (2022, March 11). *Ran Pasti Di Banten Kerahkan Semua Potensi Untuk Turunkan Stunting*. Biro Umum Dan Humas Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
- Dermawan, A., Mahanim, M., & Siregar, N. (2022a). Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Bangun Abdimas*, 1(2), 98–104. <https://doi.org/10.56854/ba.v1i2.124>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. (2022). *Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2022*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.
- Djauhari Thontowi. (2017). GIZI DAN 1000 HPK. *Jurnal Sainatika Medika: Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Dokter Keluarga*, 13(2), 125–133.
- Fallo, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Kecamatan KIE. *ProProdi Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Nusa Cendana Kupang*.
- Fitrauni, R., Muchlis, N., & Arman. (2022). Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sigi. *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*, 3(4), 193–209. <https://doi.org/10.52103/jmch.v3i4.1237>
- Ginting, I. R., Maulida, F., Ulfah, I. A., Elfiyani, N. K., Dara, P., & Pratomo, H. (2020). Analisis Kebijakan Global Travel Warning Selama Pandemi Covid-19 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Quality: Jurnal Kesehatan*, 14(2), 85–100. <https://doi.org/10.36082/qjk.v14i2.112>

- Helmyati. (2022, April 5). *Mengenal Stunting: Deteksi Dini, Dampak, dan Pencegahannya*. Pusat Kesehatan Dan Gizi Manusia Universitas Gajah Mada. <https://pkgm.fk.ugm.ac.id/2022/04/05/mengenal-stunting-deteksi-dini-dampak-dan-pencegahannya/>
- Heryana, A. (2020). Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat. *Universitas Esa Unggul*, 1–8. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17668.55684>
- Hughes, R., & Margetts, B. (2012). The public health nutrition intervention management bi-cycle: A model for training and practice improvement. *Public Health Nutrition*, 15(11), 1981–1988. <https://doi.org/10.1017/S1368980011002011>
- Hughes, R., & Margetts, B. M. (2011). *Practical Public Health Nutrition* (1st ed.). Blackwell Publishing.
- Kabupaten Tangerang. (2022). *Diseminasi Hasil Penimbangan Balita di Kabupaten Tangerang Tahun 2022*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022a). *Rapat Koordinasianalisis Situasi Dan Pemetaanprogram Stuntingkabupaten Karo Tahun 2022*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022b). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah* (Kementerian Dalam Negeri, Ed.). Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023a). *Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 (2)*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023b). *Meningkatkan Kualitas Rembuk Stunting Untuk Memperkuat Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten*.
- Kementerian Kesehatan. (2018a). *Warta Kesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (2nd ed.).
- Kementerian Kesehatan. (2018b, January 26). *Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala, Dan Mencegah*. Kementerian Kesehatan. <https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486>
- Kementerian Kesehatan. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Kota*. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Nasution, H. F. (2016). Instrumen Penelitian Dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Almasharif*, 4(1), 59–75.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
- Picauly, I. (2021). The Influence of Implementation of The Stunting Convergence Action on The Coverage Of The Sensitive Nutrition Intervention Program In The Province Of Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pazih\_Pergizi Pangan DPD NTT*, 10(2), 71–84.
- Picauly, I., Lery Mboeik, S., Sri Lendes, T., & Hayer, S. (2021). Convergence Action Assistance Accelerating Stunting Reduction in West Manggarai District, East Nusa Tenggara Province. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering*, 44–56.
- Pradono, J., Soerachman, R., Kusumawardani, N., & Kasnodiharjo. (2018). *Paduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (E. Martha & A. Suwandono, Eds.; 1st ed.). Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). *Study Guide-Stunting Dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Dan Masyarakat* (Hadianor, Ed.; 1st ed.). CV Mine.
- Risnawati, I., & Munafiah, D. (2022). Upaya Pencegahan Stunting Melalui Pemberian Makanan Seimbang Dan Stunting Massage. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(1), 40–46.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 34–39.

- Sulistiyono, P. (2021). Kajian Kesiapan Implementasi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Cirebon. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 1(1), 1–10.
- Sulistiyono, P., & Jaenudin. (2021). Kajian Kesiapan Implementasi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Cirebon. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 1(1), 1–10.
- Supriyanto, A., & Jannah, L. M. (2022). Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak. *Sosio Konsepsia*, 11(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3080>
- Susanti Abdulkadir, W., Yusuf, Z. K., Suleman, I., Keperawatan, J., Olahraga, F., Kesehatan, D., Kunci, K., Peduli, S. ; & Kader Kesehatan, K. ; (2023). *Pelatihan Kader dalam Rangka Pembentukan Forum Tangguh Cegah Stunting di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango*. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/Jpmf>,
- TNP2K. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (STUNTING)*.
- Unicef. (2020). *Situasi Anak di 2020 Indonesia- Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*.
- Wira, I. A. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stunting Pada Balita. *Pramana Jurnal Hasil Penelitian*, 2(2).
- World Health Organization. (2013). *Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences WHO Conceptual framework*.
- Yuliana, Y., Nuru, H., & Sianipar, B. K. (2022). Kejadian Stunting Berhubungan dengan 8 Aksi Konvergensi. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(1), 284–289. <https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4221>.